KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		A 1/	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 0 9 1 H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan					
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
A.1 NPWP : 1 4 6 3 0 8 1 4 3 7 2 2 0 0 0								
A.2 NIK : TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT								
A.3 Nama : INDAH DWI CAHYANTI								
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG								
MASA PAJAK (mm-yyyy)		JAK J	UMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
3	21-402-01		739.500	739.500	0	5	36.975	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 026/SP2D-GU/BLUD-RSJDAHM/III/2022								
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 6 dd 0 3 mm 2 0 2 2 уууу								
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor: Tanggal dd mm yyyy								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK								
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :			9 5 3 3 5 0		0 0 0			
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR								
C.3 ID Subunit Organisasi :		:						
C.4 Tanggal :		: 1	1 6 dd 0 3 mm	2 0 2 2 yyyy				
C.5 Nama Penandatangan :		: <u>H</u>	HARI JUMADI					
			Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.					
			esuai dengan ketentuan yang lektronik sehingga tidak diperlu	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	t mengatur bahwa de	okumen ini tel	ah ditandatangani secara	

JRF4I0Z0